



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
BADAN KERJASAMA ORGANISASI WANITA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 21/K.KB/HK.02.00/12/2018
NOMOR :

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas (21/12/2018), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ruhermansyah, SH Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (**BAWASLU**) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 21, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Hj. Sabnur Murny, SE., MM Wakil Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (**BKOW**) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kerjasama Organisasi Wanita (**BKOW**) Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Kerjasama Organisasi Wanita sebagai wadah berkumpulnya seluruh organisasi wanita yang ada di Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan yang di hadapi oleh perempuan dan berupaya melakukan perbaikan terhadap persoalan tersebut;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pilleg) Serentak Tahun 2019, maka pengawas pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pilleg) serentak tahun 2019 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. AD, ART Badan Kerjasama Organisasi Wanita;
3. Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Serentak Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- 1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serentak Tahun 2019;
- 2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan penyelenggaraan pemilihan Presiden (Pileg) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serentak Tahun 2019 dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK PERTAMA dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi edukasi, sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2019 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 3

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2019 bagi organisasi yang tergabung di Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Barat ; dan
 - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif Anggota Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Barat dalam pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Mendorong partisipasi aktif Organisasi Anggota Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka sosialisasi pengawasan pemilihan Umum Serentak Tahun 2019; dan

- b. Mendorong Organisasi Anggota Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pengawasan partisipatif pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

BAB IV PEMBERIAN INFORMASI Pasal 4

- 1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK KESATU :
 - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 dan/atau Penyelenggara Pemilu;
 - b. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Umum Serentak Tahun 2019; dan
 - c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 6

- (1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam edukasi, sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 bersifat sukarela, dan/atau;
- (2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7

- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;

- 2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini; dan
- 4) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kesepakatan ini setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

- 1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Pihak Pertama,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat



Ruhermansyah, SH

Pihak Kedua,

Wakil Ketua BKOW Provinsi Kalimantan Barat



Hj. Sabnur Murny, SE.MM